PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR:

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (DISPERINAKER) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

Sarilamak, 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan sampai dengan Triwulan II 2026 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24

BAB IV PENUTUP 51

4.1. Catatan Penting 51
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 51
4.3. Rencana Tindak Lanjut 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kalender Penyusunan Perubahan Renja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 3

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2026..... 9

Tabel 2.2. (Tabel T-C 30) Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota..... 16

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026..... 23

Tabel 3.1. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Disp[erinaker Tahun 2026..... 25

Tabel 3.2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 37

Tabel 3.3. Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026..... 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, serta menindaklanjuti amanat pasal 343-368 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka setiap Organisasi Perenagkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerjanya (Renja). Sesuai dengan Perkada Perubahan RKPD ini, perubahan Renja dilakukan terkait program, kegiatan, subkegiatan, indikator, pagu indikatif, dan hal terkait lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat (1). Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a.) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah,rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merupakan dokumen wajib yang harus disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilakukan melalui koordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 bagian ke-6, pasal 360-368, proses penyusunan Perubahan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) penyusunan rancangan perubahan renja; (ii) penyusunan rancangan akhir dan (iii) penetapan perubahan renja perangkat daerah. Sesuai dengan pasal 362 dan 364, rancangan dan rancangan akhir perubahan renja sebagaimana di tahapan (i) dan (ii) disampaikan ke Bapelitbangda untuk diverifikasi. Pada tahap penetapan, perubahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan: a.) Dasar Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan b.) Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya Pasal 358 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Bupat/Walikota tentan Perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Sejalan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2026, maka juga dilakukan perubahan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrin dan Tenaga Kerja Kabuapaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Perubahan dilakukan pada pagu anggaran kegaiatan tahun 2026 sesuai dengan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Selengkapnya jadwal penyususnan perubahan Renja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1.
Kalender Penyusunan Perubahan Renja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	TAHAPAN/URAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERNAGKAT DAERAH	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER	KETERANGAN
		MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
I	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja														
	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja														
II	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja														
	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja														
III	Penetapan Perubahan Renja														
1	Penetapan Perubahan Renja														

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022–2042;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023–2043;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota yang menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, termasuk Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna menyelaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk menyediakan dokumen perubahan rencana tahun 2026 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026. Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 antara lain:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja secara operasional dan teknis untuk mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan

urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2026.
4. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja Disperinaker, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Berisi evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan capaian Renstra Disperinaker, analisis kinerja pelayanan Disperinaker, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sebagainya.
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustran dan Tenaga Kerja
IV. Penutup. Berisi ketentuan penutup.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi: 1) penyusunan perencanaan, 2) penetapan rencana, 3) pengendalian pelaksanaan rencana, 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional.
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah tahun 2026 (RKPD tahun 2026) adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2026 dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan sampai dengan Triwulan II 2026

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima

Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026. Penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan mengacu kepada pemetaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Berdasarkan DPA Awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.324.568.110 Dengan adanya perubahan, pagu anggaran menjadi Rp.4.572.670.984,-

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2026. Evaluasi Rencana Kerja sampai triwulan II juga memperhatikan terhadap program, kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD tahun 2026. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2026. Sehingga dapat dilihat seberapa jauh tingkat capaian oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II, maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Tahun 2026 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) 2021-2025	Target Renstra Disperinaker pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Disperinaker)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Disperinaker Daerah sampai dengan Renja Disperinaker Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker Tahun berjalan (2026) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2026							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disperinaker s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Disperinaker s/d Tahun 2025			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III	IV										
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11	12			13 = 6 + 12			14=13/5			15
					K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	Tekelolnaya Informasi Tenaga Kerja	Program Perencanaan Teanaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah	3	Dokumen	44.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0				Dokumen	0		Dokumen	0			0,00	
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Peesentase Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0		44.000.000	0		0			0	0	0		0						0			0			0,00	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen RTK Makro	0	Dokumen	44.000.000	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		Dokumen				Dokumen	0		Dokumen	0				0,00	
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	90	%	7.372.202.544	90,64	%	2.082.784.049	60	%	0	0	%	0	0	%	0				%	0		%	2.082.784.049			28,25	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Kompetensi			7.177.728.944			2.082.784.049			0	0		0		0						0			2.082.784.049			29,02	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetens	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	508	Orang	4.374.464.744	347	Orang	2.082.784.049	32	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0				Orang	0		Orang	2.082.784.049			47,61	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10	Lembaga	87.737.800	0	Lembaga		0	Lembaga		0	Lembaga	0	0	Lembaga	0				Lembaga	0		Lembaga	0			0,00	
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Unit	2.715.526.400	0	Unit	0	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0				Unit	0		Unit	0			0,00	
		Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Penngkatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0		84.473.600	0	Unit	0			0	0		0		0						0			0			0,00	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	14	Perusahaan	84.473.600	0	Perusahaan	0	0	Perusahaan		0	Perusahaan	0	0	Perusahaan	0				Perusahaan	0		Perusahaan	0			0,00	
		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		110.000.000	0		0			0	0		0		0						0			0			0,00	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2	Dokumen	110.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0				Dokumen	0		Dokumen	0			0,00	
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	90	%	1.698.439.900	2,50	%	1.189.900	60	%	0	0	%	0	0	%	0				%	0		%	1.189.900			0,07	
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota				1.198.439.900			1.189.900			0	0		0		0						0			1.189.900			0,10	
		Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	4	Orang	60.000.000	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0				Orang	0		Orang	0			0,00	
		Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	400.000.000	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0				Orang	0		Orang	0			0,00	
		Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	Orang	300.000.000	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0				Orang	0		Orang	0			0,00	
		Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	251	Orang	438.439.900	28	Orang	1.189.900	16	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0				Orang	0		Orang	1.189.900			0,27	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				500.000.000			0			0	0		0		0						0			0			0,00	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	Orang	500.000.000	0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang					Orang	0		Orang	0			0,00	
	Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.419.000			1.000.000						0		0						0			1.000.000			2,82	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) 2021-2025	Target Renstra Disperinaker pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Disperinaker)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Disperinaker Daerah sampai dengan Renja Disperinaker Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker Tahun berjalan (2026) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2026								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disperinaker s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Disperinaker s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10	11			12		13 = 6 + 12		14=13/5		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	8.500.000	2	Dokumen 1.000.000	8	Dokumen 0	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 1.000.000			11,76	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	2	Dokumen	3.500.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2.907.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	2	Dokumen	2.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	Laporan	3.512.000	0	Laporan	0	Laporan 0	0	Laporan	0	Laporan 0					Laporan 0		Laporan 0			0,00	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	Laporan 0	0	Laporan	0	Laporan 0					Laporan 0		Laporan 0			0,00	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah.	2	Data	3.000.000	0	Data	0	Data 0	0	Data	0	Data 0					Data 0		Data 0			0,00	
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	8.000.000	0	Berita Acara	0	Berita Acara 0	0	Berita Acara	0	Berita Acara 0					Berita Acara 0		Berita Acara 0			0,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.003.791.407		3.654.998.902		3.925.364.710		955.558.817		1.904.557.288					2.860.116.105		6.515.115.007			36,19	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	Orang/Bulan	17.980.291.407	43	Orang/Bulan 3.654.011.902	45	Orang/Bulan 3.925.364.710	45	Orang/Bulan 955.558.817	45	Orang/Bulan 1.904.557.288					Orang/Bulan 2.860.116.105		Orang/Bulan 6.514.128.007			36,23	
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dokumen	5.500.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	11.000.000	1	Laporan 987.000	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan 0					Laporan 0		Laporan 987.000			8,97	
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2	Dokumen	3.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan 0					Laporan 0		Laporan 0			0,00	
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2	Dokumen	2.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.500.000		992.000		0		0		0					0		992.000			1,93	
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Unit	7.000.000	0	Unit	0	Unit 0	0	Unit 0	0	Unit 0					Unit 0		Unit 0			0,00	
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000	0	Paket	0	Paket 0	0	Paket 0	0	Paket 0					Paket 0		Paket 0			0,00	
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	3.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	8.500.000	1	Dokumen 992.000	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 992.000			11,67	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	4.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0	0	Dokumen 0					Dokumen 0		Dokumen 0			0,00	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	20.000.000	0	Orang	0	Orang 0	0	Orang 0	0	Orang 0					Orang 0		Orang 0			0,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	176	Orang	4.000.000	0	Orang	0	Orang 0	0	Orang 0	0	Orang 0					Orang 0		Orang 0			0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) 2021-2025	Target Renstra Disperinaker pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Disperinaker)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Disperinaker Daerah sampai dengan Renja Disperinaker Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker Tahun berjalan (2026) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2026								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disperinaker s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Disperinaker s/d Tahun 2025			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III	IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11	12			13 = 6 + 12			14=13/5			15	
					K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				693.803.984			31.369.600			9.236.000		0		2.652.500					2.652.500			34.022.100			4,90	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	23.497.000	1	Paket	2.480.000	0	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0				Paket	0		Paket	2.480.000			10,55	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Paket	25.000.000	0	Paket		0	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0				Paket	0		Paket	0			0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan'	4	Paket	19.000.000	0	Paket		0	Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0				Paket	0		Paket	0			0,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	27	Paket	62.933.000	1	Paket	7.332.000	1	Paket	3.500.000	0 Paket	0	0 Paket	897.800				Paket	897.800		Paket	8.229.800			13,08	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	27	Paket	39.580.984	1	Paket	3.204.600	1	Paket	1.376.000	0 Paket	0	0 Paket	389.700				Paket	389.700		Paket	3.594.300			9,08	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30	Dokumen	8.000.000	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				Dokumen	0		Dokumen	0			0,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	27	Laporan	39.340.000	1	Laporan	3.400.000	1	Laporan	860.000	0 Laporan	0	0 Laporan	325.000				Laporan	325.000		Laporan	3.725.000			9,47	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	27	Laporan	455.453.000	1	Laporan	14.953.000	1	Laporan	3.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	1.040.000				Laporan	1.040.000		Laporan	15.993.000			3,51	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9	Dokumen	21.000.000	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				Dokumen	0		Dokumen	0			0,00	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.068.800.000			4.800.000			0		0		0					0			4.800.000			0,45	
		Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	250.000.000	0	Unit		0	Unit	0	0 Unit		0 Unit	0				Unit	0		Unit	0			0,00	
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	Unit	70.000.000	0	Unit		0	Unit	0	0 Unit		0 Unit	0				Unit	0		Unit	0			0,00	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Unit	204.800.000	1	Unit	4.800.000	0	Unit	0	0 Unit		0 Unit	0				Unit	0		Unit	4.800.000			2,34	
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	400.000.000	0	Unit		0	Unit	0	0 Unit		0 Unit	0				Unit	0		Unit	0			0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	144.000.000	0	Unit		0	Unit	0	0 Unit		0 Unit	0				Unit	0		Unit	0			0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				914.988.800			125.612.391			85.213.400		6.159.500		50.730.924					56.890.424			182.502.815			19,95	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	Laporan	2.000.000	0	Laporan		0	Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0				Laporan	0		Laporan	0			0,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7	Laporan	257.926.800	1	Laporan	41.672.703	1	Laporan	43.063.400	0 Laporan	0	0 Laporan	15.657.056				Laporan	15.657.056		Laporan	57.329.759			22,23	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	Laporan	655.062.000	1	Laporan	83.939.688	1	Laporan	42.150.000	0 Laporan	6.159.500	0 Laporan	35.073.868				Laporan	41.233.368		Laporan	125.173.056			19,11	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				744.513.388			30.797.600			24.114.000		0		3.392.200					3.392.200			34.189.800			4,59	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	77	Unit	464.151.166	5	Unit	25.197.600	20	Unit	22.114.000	0 Unit	0	0 Unit	3.297.200				Unit	3.297.200		Unit	28.494.800			6,14	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15	Unit	17.500.000	0	Unit		0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit					Unit	0		Unit	0			0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan danm mesin lainnya yang dipelihara	91	Unit	96.850.000	30	Unit	4.850.000	10	Unit	2.000.000	0 Unit	0	0 Unit	95.000				Unit	95.000		Unit	4.945.000			5,11	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	83.750.022	1	Unit	750.000	0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0				Unit	0		Unit	750.000			0,90	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) 2021-2025	Target Renstra Disperinaker pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Disperinaker)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Disperinaker Daerah sampai dengan Renja Disperinaker Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker Tahun berjalan (2026) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2026						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disperinaker s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Disperinaker s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14=13/5		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	82.262.200	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0			Unit	0			0,00	
6	Meningkatnya Realsiasi Pembangunan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	16	%	2.832.112.100	10	%	14.791.292	0	%	22.310.400	0	%	1.037.000	0	%	4.377.000				5.414.000		20.205.292			0,71	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2.832.112.100			14.791.292			22.310.400			1.037.000			4.377.000				5.414.000		20.205.292			0,71	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	Dokumen	1.652.885.000	1	Dokumen	731.000	1	Dokumen	2.154.000	0	Dokumen	430.000	0	Dokumen	835.000			Dokumen	1.265.000	Dokumen	1.996.000			0,12	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dokumen	320.000.000	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0			Dokumen	0	Dokumen	0			0,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	5	Dokumen	407.064.600	1	Dokumen	6.902.592	1	Dokumen	15.156.400	0	Dokumen	527.000	0	Dokumen	3.462.000			Dokumen	3.989.000	Dokumen	10.891.592			2,68	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	5	Dokumen	217.162.500	1	Dokumen	7.157.700	1	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	80.000	0	Dokumen	80.000			Dokumen	160.000	Dokumen	7.317.700			3,37	
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kab/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah program pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diimplementasikan	3	Dokumen	160.000.000	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0			Dokumen	0	Dokumen	0			0,00	
		Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	2	Laporan	75.000.000	0	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0			Laporan	0	Laporan	0			0,00	
7	Meningkatnya Pemanfaatan Infirmasi Industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	1.551.341.300	100	%	107.018.943	100	%	72.689.600	100	%	8.816.212	100	%	17.036.311				25.852.523		132.871.466			8,56	
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				1.551.341.300			107.018.943			72.689.600			8.816.212			17.036.311				25.852.523		132.871.466			8,56	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5	Dokumen	731.098.500	1	Dokumen	6.151.000	1	Dokumen	3.932.500	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.099.500			Dokumen	1.099.500	Dokumen	7.250.500			0,99	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	16	Dokumen	820.242.800	1	Dokumen	100.867.943	1	Dokumen	68.757.100	0	Dokumen	8.816.212	0	Dokumen	15.936.811			Dokumen	24.753.023	Dokumen	125.620.966			15,32	
						0																				#DIV/0!	
8	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Tranmigrasi yang Berkembang	35	%	721.000.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0				0		0			0,00	
		Kegaiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				721.000.000			0			0			0			0				0		0			0,00	
		Pelatihan Tranmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	225	Orang	415.000.000	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang		0	Orang	0			Orang	0	Orang	0			0,00	
		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Tranmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	10	Lokasi	306.000.000	0	Lokasi		0	Lokasi	0	0	Lokasi		0	Lokasi	0			Lokasi	0	Lokasi	0			0,00	
9	Meingkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	11	%	69.968.800	0	%	968.800	0	%	0	0	%	0	0	%	0				0		968.800			1,38	
		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				69.968.800			968.800			0			0			0				0		968.800			1,38	
		Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	69	Keapala Le;uarga	69.968.800	2	Keapala Le;uarga	968.800	0	Keapala Le;uarga		0	Keapala Le;uarga		0	Keapala Le;uarga	0			Keapala Le;uarga		Keapala Le;uarga	968.800			1,38	
TOTAL						37.141.881.223			6.056.323.477			4.324.568.110			971.571.529			1.982.746.223	0	0		2.954.317.752		9.010.641.229			24,26	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*) 2021-2025	Target Renstra Disperinaker pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Disperinaker)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Disperinaker Daerah sampai dengan Renja Disperinaker Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker Tahun berjalan (2026) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2026								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Disperinaker yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disperinaker s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Disperinaker s/d Tahun 2025			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III	IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11	12			13 = 6 + 12			14=13/5			15	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
4	Meningkatnya Tenaga Kerja Indonesia yang Terlindungi	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Dasarnya	100	%	1.340.000.000	0	%	0	0	%	185.640.000	0	% 0	0	% 0				%	0		%	0			0,00		
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota				560.000.000	0		0			0		0	0	0					0			0			0,00		
		Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	200.000.000	0	Perusahaan		0	Perusahaan		0	Perusahaan 0	0	Perusahaan 0				Perusahaan	0		Perusahaan	0			0,00		
		Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10	Perusahaan	100.000.000	0	Perusahaan		0	Perusahaan		0	Perusahaan 0	0	Perusahaan 0				Perusahaan	0		Perusahaan	0			0,00		
		Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	260.000.000	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan 0	0	Laporan 0				Laporan	0		Laporan	0			0,00		
		Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota				780.000.000	0		0			185.640.000		0	0	0					0			0			0,00		
		Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	Perkara	300.000.000	0	Perkara		0	Perkara		0	Perkara 0	0	Perkara 0				Perkara	0		Perkara	0			0,00		
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	Perkara	100.000.000	0	Perkara		0	Perkara		0	Perkara 0	0	Perkara 0				Perkara	0		Perkara	0			0,00		
		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	Asosiasi dan Serikat Pekerja	100.000.000	0	Asosiasi dan Serikat Pekerja		0	Asosiasi dan Serikat Pekerja		0	Asosiasi dan Serikat Pekerja 0	0	Asosiasi dan Serikat Pekerja 0				Asosiasi dan Serikat Pekerja	0		Asosiasi dan Serikat Pekerja	0			0,00		
		Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10	Lemabaga	80.000.000	0	Lemabaga		0	Lemabaga		0	Lemabaga 0	0	Lemabaga 0				Lemabaga	0		Lemabaga	0			0,00		
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200	Orang	200.000.000	0	Orang		1.676	Orang	185.640.000	0	Orang 0	0	Orang 0				Orang	0		Orang	0			0,00		
5	Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	21.512.816.579	100	%	3.849.570.493	100	%	4.043.928.110	100	% 961.718.317	100	% 1.961.332.912					2.923.051.229			6.772.621.722			31,48		

Adapun capaian pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sampai Triwulan ke II dapat dilihat pada table 2.1 di atas. Realisasi keuangan pada program penunujang sebesar Rp.2.923.051.229,- dengan capaian kinerja 72,28%. Realisasi program perencanaan dan pembangunan industri sebesar Rp.5.414.000,- dengan capaian kinerja 24,27%. Realisasi program pengelolaan sistem informasi industri nasional sebesar Rp.25.852.523,- dengan capaian kinerja 35,57%. Dan program yang baru masuk pada pergeseran yaitu program hubungan industrial dengan total pagu Rp.185.640.000.

Rincian capaian kinerja pada setiap kegiatan yang terlaksana pada tahun 20206 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
   A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.3.923.364.710,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.860.116.105,- dan capaian kinerja sebesar 72,86%.
   B. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp.9.236.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.652.500,- dan capaian kinerja sebesar 28,72%.
   C. Penyedian Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran Rp.85.213.400,- realisasi keuangan sebesar Rp.56.890.424,- dan capaian kinerja sebesar 66,76%.
   D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran Rp.24.114.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.392.200,- dan capaian kinerja sebesar 14,07%.
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan:
   A. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.22.310.400,- realisasi keuangan sebesar Rp.5.414.000,- dan capaian kinerja sebesar 24,27%.
3. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional, denga kegiatan:
   A. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industriuntuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewewnangan Kabuapaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.72.689.600,- realisasi keuangan sebesar Rp.25.852.523,- dan capaian kinerja sebesar 35,57%.
4. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan:
   A. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.640.000.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diatur Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Lingkup Kabupaten.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

5. Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang ditargetkan diawal Tahun Anggaran dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
(Tabel T-C 30) Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKD/ IKK	IKU/ IKD	IKU Kepala Perinaker	Target Renstra Perangkat Daerah				Reaslisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (TW II)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	-	-	0,0807	0,0887	0,0986	-	0,0047	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	-	-	-	10	10	10	-	3	3	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-	-	-	10	10	10	-	2	2	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditemapatkan	-	-	-	-	550	600	650	-	87	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	-	-	-	-	7000	7250	7500	-	18482	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
6	Besaran tenaga kerja yang mendpatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	-	-	180	180	180	-	48	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKD/ IKK	IKU/ IKD	IKU Kepala Perinaker	Target Renstra Perangkat Daerah				Reaslisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (TW II)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	-	-	70	70	70	-		-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya tidak tersedia. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
8	Besaran tenag kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	-	-	-	90	90	90	-	82	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
9	Angka partisipasi angkatan kerja	-	-	-	-	55,75	56,24	56,78	-	57,28	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	-	-	-	78,18	78,23	78,88	-	74,14	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
11	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	-	2,44	2,27	2,07	-	8,68	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
12	Rasio Penduduk yang bekerja	-	-	-	-	98,9	98,98	98,95	-	96,82	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
13	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	-	-	-	-	76,4	77,4	78,4	-	74,17	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKD/ IKK	IKU/ IKD	IKU Kepala Perinaker	Target Renstra Perangkat Daerah				Reaslisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (TW II)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	-	-	-	-	79,13	79,23	79,33	-	79,43	-	-	-	-	• Realisasi capaian tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditetapkan. • Indikator berasal dari Renstra 2021-2025
15	Proporsi pengangguran terbuka	-	√	√	-	-	-	3,55%	3,47%	-	-	-	3,55%	3,47%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
16	Cakupan kepersetaan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	-	-	√	-	-	29,27 %	32,55%	-	-	-	29,27%	32,55%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
17	Tingkat produktifitas tenaga kerja	-	-	√	√	-	-	Rp 64.374 .937	Rp 65.877.88 1	-	-	-	Rp 64.374.93 7	Rp 65.877.88 1	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian tinggi	-	-	-	√	-	-	67.29 %	68,97%	-	-	-	67.29%	68,97%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
19	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	-	-	-	√	-	-	Rp 71.224 .927	Rp 72.443.38 0	-	-	-	Rp 71.224.92 7	Rp 72.443.38 0	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKD/ IKK	IKU/ IKD	IKU Kepala Perinaker	Target Renstra Perangkat Daerah				Reaslisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (TW II)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Rasio PDRB industri pengolahan	-	√	√	√	-	-	7,39%	7,77%	-	-	-	7,39%	7,77%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
21	Rasio kewirausahaan	-	√	√	√	-	-	6,92%	6,92%	-	-	-	6,92%	6,92%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
22	Proporsi penciptaan lapngan kerja formal	-	√	√	√	-	-	42,90 %	44,81%	-	-	-	42,90%	44,81%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
23	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	-	√	√	√	-	-	63,23 %	63,57%	-	-	-	63,23%	63,57%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
24	Proporsi jumlah IKM	-	√	√	√	-	-	3,59%	3,67%	-	-	-	3,59%	3,67%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
25	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	-	√	-	-	-	7,39%	7,77%	-	-	-	7,39%	7,77%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029
26	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	-	-	√	-	-	-	8%	8,50%	-	-	-	8%	8,50%	• Proyeksi realisasi capaian pada tahun 2026 dan 2027 doharapkan tercapai sesuai target • Indiaktor baru renstra 2025-2029

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan sektor industri dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi Pendukung. Memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital. Memanfaatkan media komunikasi digital, seperti WhatsApp Group, untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi antara bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta dengan perangkat daerah terkait, sehingga penyampaian informasi, permintaan data, dan tindak lanjut pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna membahas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut. Melalui peningkatan kualitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, diharapkan pencapaian target kinerja bidang perindustrian dan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal.
4. Penguatan Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga di tingkat pusat, serta dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan IKM. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memperluas manfaat pelayanan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta pencapaian kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perumusan isu penting ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan evaluasi Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra OPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan utama yang dihadapi meliputi:

1. Sektor Perindustrian: Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang IKM.

2. Sektor Ketenagakerjaan: Kualitas tenaga kerja yang masih rendah, terbatasnya peluang dan informasi kesempatan kerja, serta kendala dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus pada sektor ketenagakerjaan, kendala PAD disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran dan kegiatan sosialisasi/koordinasi dengan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA), sehingga pembayaran retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) untuk perpanjangan masa kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota belum maksimal.
3. Sektor Ketransmigrasian: Masih kurangnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan pemukiman transmigrasi.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 sudah berjalan cukup optimal melalui beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Penerapan Aplikasi SIPD: Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, dan tepat waktu.
2. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital: Memanfaatkan media sosial dan grup percakapan (seperti WhatsApp Group) untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antar-OPD.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Berkala: Meningkatkan kuantitas dan kualitas rakor internal di tingkat bidang, baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan daerah.

Di sisi lain, peluang pembangunan dimaknai sebagai potensi atau kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong capaian kinerja. Peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Sektor Perindustrian: Sektor industri memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui indikator kontribusi terhadap PDRB. Selama periode 2021–2025, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan (pada tahun 2024, target kontribusi sebesar 6,88% terealisasi sebesar 6,66%). Oleh karena itu, diperlukan intervensi Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan kegiatan temu bisnis (business matching), serta peningkatan akses permodalan bagi IKM melalui kemitraan usaha (sistem bapak angkat) dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
2. Sektor Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lima Puluh Kota terus menurun setiap tahun dan menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dipengaruhi oleh berbagai dinamika penduduk usia kerja, seperti mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau belum bekerja karena alasan tertentu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan per tenaga kerja (periode 2023–2024) tetap bertumbuh meskipun mengalami perlambatan. Sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar, prioritas ketenagakerjaan kurun waktu 2023–2025 mencakup

penanganan sengketa hubungan industrial, Perjanjian Bersama (PB), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan kewirausahaan.

3. Sektor Ketransmigrasian: Telah dilaksanakannya kegiatan penguatan kapasitas SDM di kawasan pemukiman transmigrasi, seperti di Nagari Muaro Peti (Kecamatan Kapur IX) dan Nagari Tanjung Balik (Kecamatan Pangkalan Koto Baru).

Selain peluang, terdapat pula tantangan kinerja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pada sektor perindustrian, tantangan utama mencakup tingginya biaya faktor produksi yang menurunkan daya saing IKM, maraknya produk luar daerah berharga kompetitif yang masuk ke pasar lokal, masih rendahnya pengembangan industri hilir produk lokal, serta kurangnya kemandirian dan jiwa kewirausahaan masyarakat. Dari sektor ketenagakerjaan, penempatan angkatan kerja belum optimal sesuai dengan latar belakang pendidikan/keterampilannya, disertai tingginya tingkat persaingan antar-pencari kerja. Sementara dari sektor ketransmigrasian, tantangan berfokus pada terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang di lokasi transmigrasi baru, terutama akses jalan utama dari ibu kota kabupaten/kecamatan yang belum memadai dan sulit dilalui kendaraan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan internal serta hasil telaahan terhadap kebijakan Kementerian/Lembaga terkait, dirumuskan beberapa isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengembangan Industri

   Pengembangan sektor industri belum berjalan secara optimal, mencakup industri pengolahan tekstil, pengolahan pangan, pengolahan nonpangan, serta aneka kerajinan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal dan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi masih perlu ditingkatkan.

2. Belum Terwujudnya Daya Saing Produk Industri

   Daya saing produk industri Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah, yang ditandai dengan masih minimnya produk lokal yang mampu menembus pasar internasional maupun kawasan ASEAN. Bahkan pada tingkat domestik, produk daerah masih sulit bersaing karena kualitas hasil produksi yang belum maksimal, terutama pada produk pangan, kerajinan anyaman mansiang, tas, sulaman, tenun, bordir, serta aneka industri lainnya.

   Dilihat dari skala usahanya, sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam volume besar. Di samping itu, belum berkembangnya diversifikasi serta inovasi desain produk kerajinan menyebabkan variasi produk terkesan monoton, yang pada akhirnya turut melemahkan daya saing produk di pasaran.

3. Keterbatasan Kesempatan Kerja, Akses Informasi, dan Kualitas Angkatan Kerja

Terbatasnya lapangan pekerjaan, sulitnya akses informasi kesempatan kerja, serta masih rendahnya kualitas dan keterampilan (skill) angkatan kerja menjadi isu kunci pada sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain masih minimnya arus investasi/modal asing yang bersifat padat karya, belum kondusifnya iklim investasi daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta regulasi dan tata kelola birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah serta adanya beban penyesuaian upah bagi sebagian perusahaan yang belum stabil semakin memperberat kondisi ketenagakerjaan daerah.

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, salah satu tahapan krusial yang tidak boleh diabaikan adalah penampungan usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah (bottom-up) atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah.

Sampai dengan proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan, belum diterima usulan program maupun kegiatan dari masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagaimana tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N I H I L				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perubahan Renja Disperinaker) ini disusun mengacu pada perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Perubahan Renja Disperinaker juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Disperinaker 2025-2029, terutama pada target-target yang belum tercapai dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang.

Sub bab ini berisi tabel review terhadap Rancangan Perubahan Renja Disperinaker, tabel rencana perubahan program dan kegiatan yang diambil dari aplikasi SIPD RI dan tabel rekapitulasi pendanaan tahun 2026. Peubahan Renja ini dipastikan data program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu dan sama dengan data Perubahan RKPD 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026, Dsiperinaker memperoleh tambahan alokasi anggaran sebagai bentuk dukunagan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis daerah, yaitu tambahan anggaran sebesar Rp. 185.640.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Penambahan alokasi anggaran DBH Perkebunan Sawit tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan SAWIT, serta telah disetujuinya Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota oleh kementrian terkait, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Adapun mengenai uraian review terhadap Rancangan Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Disp[erinaker Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100%	4.731.144.557	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100%	3.921.636.234	
I.1	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	13.000.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	0	
1	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	
2	Monitorting, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.000.000	Monitorting, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	414.988.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	100%	-	9.236.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan	1 paket	0	
6	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000	Penyedia Bahn Logistik Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	3.500.000	
5	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.000.000	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1.376.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	54.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	860.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Penyelenggara Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	234.998.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Penyelenggara Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerinta daerah	100%	99.947.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerinta daerah	100%	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pengadaan Mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Digunankan	-	0	Pengadaan Mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Digunankan	-	0	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	99.947.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	
11	Penyedia Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersdianya jasa penunjang urasan pemerintah	100%	457.400.000	Penyedia Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersdianya jasa penunjang urasan pemerintah	100%	85.213.400	
12	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	80.000.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	43.063.400	
13	Penyediaan jasa pelyanan umum kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	377.400.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	42.150.000	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	100%	276.236.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	24.114.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	20 unut	179.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	20 unut	24.114.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000	
17	Pemelihaaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan yang lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.936.000	Pemelihaaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan yang lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
19	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	17.499.900	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	0	
20	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	17.499.900	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0	
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	
23	Adminitrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya administrasi keuangan pernagkat daerha	100%	3.452.073.657	Adminitrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya administrasi keuangan pernagkat daerha	100%	3.803.072.834	
24	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	3.438.068.357	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	3.803.072.834	
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhirtahun SKPD	1 Laporan	14.005.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhirtahun SKPD	1 Laporan	0	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program : PERNCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : PERNCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1.2	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumnlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumnlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	0	
III	Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pe;atihan tenaga kerja	100%	225.000.000	Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pe;atihan tenaga kerja	100%	0	
1.3	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdassarkan kompetensi	100%	225.000.000	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdassarkan kompetensi	100%	0	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Perancari Kerja berdasarkan Klastr Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kopetensi Pada Tahun N	32 Orang	225.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Perancari Kerja berdasarkan Klastr Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kopetensi Pada Tahun N	-	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	100%	129.446.647	Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	100%	0	
1.4	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota	100%	129.446.647	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota	100&	0	
1	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	16 Orang	129.446.647	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	0	
IV	Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	185.640.000	
1.4	Program : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	185.640.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Pelaksanaan Jasmani Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahtraan Pekerja	-	0	Penegmbangan Pelaksanaan Jasmani Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahtraan Pekerja	1676 orang	185.640.000	
V	Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA IINDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	16,68%	1.148.449.800	Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA IINDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	16,68%	22.310.400	
1.5	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	100%	1.148.449.800	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	100%	22.310.400	
1	Koordinasi, Singkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	0	Koordinasi, Singkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	0	
2	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Srana dan Prasarana Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	890.030.000	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Srana dan Prasarana Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	2.154.000	
3	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1 dokumen	225.000.000	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1 dokumen	15.156.400	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Serta Masyarakat					Serta Masyarakat			
4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	33.419.800	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	5.000.000	
VI	Program : PENGELOLA SITEM INFORMASI NASIONAL	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	559.590.000	Program : PENGELOLA SITEM INFORMASI NASIONAL	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	72.689.600	
1.6	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanagn Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab 50 Kota	100%	559.590.000	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanagn Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab 50 Kota	100%	72.689.600	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	159.590.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	3.932.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	1 dokumen	400.000.000	Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	1 dokumen	68.757.100	
VII	Program: PERENCAAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program: PERENCAAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1.7	Kegiatan: Pencadanagn Tanah Untuk Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Kegiatan: Pencadanagn Tanh Untuk Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1	Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi yang Bisa Dibangun yang Dikerja Samakan Dengan Daerah Lain	1 dokumen	0	Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi yang Bisa Dibangun yang Dikerja Samakan Dengan Daerah Lain	1 dokumen	0	
VIII	Program: PENEGMBANGAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	100%	61.492.500	Program: PENEGMBANGAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	100%	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Kegiatan: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandisrian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	100%	61.492.500	Kegiatan: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandisrian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	100%	0	
1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Trasmigrasi yang Dibina	10 Kepala Keluarga	61.492.500	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Trasmigrasi yang Dibina	10 Kepala Keluarga	0	
Jumlah					6.855.123.504	Jumlah				4.202.276.234	

Adapun perubahan Rencana Kerja Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA							6.855.123.504,00	4.138.928.110,00	4.202.276.234,00	-2.652.847.270,00							7.703.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							354.446.647,00	0,00	185.640.000,00	-168.806.647,00							770.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							354.446.647,00	0,00	185.640.000,00	-168.806.647,00							770.000.000,00	
1,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja				100 %	100 %	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							400.000.000,00	
		[Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja]	-	-	-	-			*225.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-225.000.000,00*						-	*400.000.000,00*	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksanany a pelatihan berdasarkan kompetensi				100 %	100 %	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				32 Orang	32 Orang	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja				100 %	100 %	129.446.647,00	0,00	0,00	-129.446.647,00					-		120.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota				100 %	100 %	129.446.647,00	0,00	0,00	-129.446.647,00							120.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				16 Orang	16 Orang	129.446.647,00	0,00	0,00	-129.446.647,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	0,00	0,00	185.640.000,00	185.640.000,00					-		250.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	-				-	-	0,00	0,00	185.640.000,00	185.640.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				-	1676 Orang	0,00	0,00	185.640.000,00	185.640.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.500.676.857,00	4.138.928.110,00	4.016.636.234,00	-2.484.040.623,00							6.933.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							6.439.184.357,00	4.138.928.110,00	4.016.636.234,00	-2.422.548.123,00							6.833.000.000,00	
4,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah				100 %	100 %	4.731.144.557,00	4.043.928.110,00	3.921.636.234,00	-809.508.323,00							4.833.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	17.499.900,00	0,00	0,00	-17.499.900,00							23.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	17.499.900,00	0,00	0,00	-17.499.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	3.452.073.657,00	3.925.364.710,00	3.803.072.834,00	350.999.177,00							3.365.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.438.068.357,00	3.925.364.710,00	3.803.072.834,00	365.004.477,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	14.005.300,00	0,00	0,00	-14.005.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00							15.000.000,00	
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah				100 %	100 %	414.988.000,00	9.236.000,00	9.236.000,00	-405.752.000,00							460.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-56.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	-43.624.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	54.990.000,00	860.000,00	860.000,00	-54.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semu	DANA ALOKASI UMU	-	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													a Kecamatan, Semua Kel/Desa	M (DAU)						KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	234.998.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-231.498.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	99.947.000,00	0,00	0,00	-99.947.000,00							150.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	99.947.000,00	0,00	0,00	-99.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	457.400.000,00	85.213.400,00	85.213.400,00	-372.186.600,00							500.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	43.063.400,00	43.063.400,00	-36.936.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	377.400.000,00	42.150.000,00	42.150.000,00	-335.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	276.236.000,00	24.114.000,00	24.114.000,00	-252.122.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				20 Unit	20 Unit	179.300.000,00	22.114.000,00	22.114.000,00	-157.186.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	46.936.000,00	0,00	0,00	-46.936.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGU	Persentase peningkatan produk IKM yang				16.68 %	16.68 %	1.148.449.800,00	22.310.400,00	22.310.400,00	-1.126.139.400,00					-		1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		NAN INDUSTRI	berkualitas																	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota				100 %	100 %	1.148.449.800,00	22.310.400,00	22.310.400,00	-1.126.139.400,00							1.300.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	890.030.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	-887.876.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				0 0	1 0	225.000.000,00	15.156.400,00	15.156.400,00	-209.843.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.419.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-28.419.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
6,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten				100 %	100 %	559.590.000,00	72.689.600,00	72.689.600,00	-486.900.400,00					-		700.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI di Kab 50 Kota				100 %	100 %	559.590.000,00	72.689.600,00	72.689.600,00	-486.900.400,00							700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				1 Dokumen	1 Dokumen	159.590.000,00	3.932.500,00	3.932.500,00	-155.657.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas*				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	68.757.100,00	68.757.100,00	-331.242.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							61.492.500,00	0,00	0,00	-61.492.500,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7,	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian				100 %	100 %	61.492.500,00	0,00	0,00	-61.492.500,00					-		100.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pengembangan wilayah transmigrasi				100 %	100 %	61.492.500,00	0,00	0,00	-61.492.500,00							100.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*				10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	61.492.500,00	0,00	0,00	-61.492.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H								6.855.123.504,00	4.138.928.110,00	4.202.276.234,00	-2.652.847.270,00							7.703.000.000,00	

Sedangkan rekapitulasi kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Bidang Urusan	RENJA 2026				PERUBAHAN RENJA 2026			
		Jumlah			Total Pagu	Jumlah			Total Pagu
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Tenaga Kerja	2	2	2	354.446.647	1	1	1	185.640.000
2	Perindustrian	3	9	20	6.439.184.357	3	6	14	4.016.636.234
3	Transmigrasi	1	1	1	61.492.500	0	0	0	0
TOTAL		6	12	23	6.855.123.504	4	7	15	4.202.276.234

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Renja Disperinaker) disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Disperinaker sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 adalah Rencana Strategis (Renstra) Disperinaker tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Disperinaker memuat hal-hal yang terkait dengan hasil pengendalian pelaksanaan renja Disperinaker sampai dengan triwulan II tahun 2026, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan disertai dengan perubahan rencana kerja dan pendanaan Disperinaker pada tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Renja Disperinaker bertujuan untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, antarkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram dalam internal Disperinaker dan antar perangkat daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Disperinaker sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Disperinaker dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Disperinaker serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Disperinaker secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan

Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 sesuai tugas dan fungsinya.

2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja serta perubahannya.
3. Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Disperinaker Tahun Anggaran 2026.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulanan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Disperinaker Tahun 2026 yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Disperinaker Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksananan Anggaran Tahun Anggaran 2026, dan diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Demikian Perubahan Renja Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Disperinaker dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

S A F N I